

LEMBAR PEMBERITAHUAN PENGUMUMAN LHKPN

Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
u.p. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-1
Jakarta, 12920
Telp. (62-21) 25578300 Ext. 8825, 8664
Faks. (62-21) 52921231, 52921230

Bersama ini disampaikan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyono
Jabatan : Inspektur
Instansi : Pemerintah Kabupaten Sleman
NHK : 164727
Jenis Formulir : B1
Tanggal Pelaporan : 28 Mei 2014
No BN / Tanggal BN : 23 / 20 Maret 2015
Nomor Telepon / HP : 081328778802
(harap di isi)

menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tambahan Berita Negara (TBN) telah diterima pada tanggal 13-07-2015.
2. Bahwa TBN tersebut telah diumumkan pada Papan Pengumuman Resmi Instansi pada tanggal 15-07-2015

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sleman 15-07-2015

Mengetahui,
Pimpinan Instansi/Unit,


(SUYONO, S.H., M. Hum)

Wakil LHKPN,


(SUYONO, S.H., M. Hum)

CATATAN

Lembar Pemberitahuan ini harap dikirimkan Ke KPK melalui:

1. Faksimili nomor 021-52921231, 021-52921230; atau
2. Email: Pengumuman.lhkpn@kpk.go.id; atau
3. Pos dengan alamat Kantor KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920.



2015

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA****B1**Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 20 Maret 2015 No. 23

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUYONO, S.H., M.Hum.
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NIK : 164727
4. Tempat & Tanggal Lahir : KLATEN, 22 Agustus 1960
5. Alamat Kantor : Jl. RORO JONGGRANG NO. 2, SLEMAN
6. Tanggal Pelaporan : 27 Oktober 2011, 28 Mei 2014

Status Laporan**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 504 m² & 125 m², di Kabupaten SLEMAN, yang berasal dari WARISAN, perolehan tahun 1990
2. Tanah & Bangunan seluas 400 m² & 125 m², di Kabupaten SLEMAN, yang berasal dari WARISAN, perolehan tahun 1990 (Penambahan Data Baru)

	27 Oktober 2011	28 Mei 2014
	Rp. 334.425.000	Rp. 846.850.000
1.	Rp. 334.425.000	Rp. 334.425.000
2.	-----	Rp. 512.425.000

B. HARTA BERGERAK

	Status Laporan	
	27 Oktober 2011	28 Mei 2014
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA		
1. Mobil, merk ISUZU PANTHER, tahun pembuatan 1999, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010	Rp. 106.000.000	Rp. 251.000.000
2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2006, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006	Rp. 86.000.000	Rp. 86.000.000
3. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2006, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
4. Mobil, merk SUZUKI, tahun pembuatan 2012, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 (Penambahan Data Baru)	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA		
c. HARTA BERGERAK LAINNYA		
1. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru)	Rp. 900.000	Rp. 1.800.000
C. SURAT BERTHARGA		
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA		
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 52.192.070	Rp. 65.607.973
E. PIUTANG		
	Rp. 0	Rp. 0

TOTAL HARTA (II)**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)**

	Status Laporan	
	27 Oktober 2011	28 Mei 2014
	Rp. 493.517.070	Rp. 1.165.257.973
	-----	-----
	Rp. 493.517.070	Rp. 1.165.257.973

Jakarta, 26 Februari 2015

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLH. DEPUTI



CAHYA H. HAREFA

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
PEMERIKSAAN LHKPN
DIREKTUR



CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.